

Setelah Kesunyian 50 Tahun Disuarakan Lewat Buku dan Film Dokumenter

Maria Hartiningsih
Program Studi Kajian Gender
Pascasarjana Universitas Indonesia, lulus tahun 2003
E-mail: mariakompas@gmail.com

ABSTRACT

After 50 Years of Silence Voiced by Books and Documentary Film. Not many people read the news of Jan Ruff-O'Herne's return on the morning of August 19, 2019 at his home, in Adelaide, Australia, surrounded by his children, grandchildren and great-grandchildren. She is 96 years old. Jan Ruff-O'Herne left a trail of more than five decades of fighting to campaign against rape in war and spent the rest of his life reclaiming his dignity. She was the first European woman who dared to testify publicly. He tore the silence of the black history that was denied for a very long time by the party that did it. For that, he received various awards, including from the Australian Government, the Dutch Government, and the Vatican. O'Herne was one of the few European women in the Japanese occupied territories during World War II who were forced into sex slavery. Most of them come from Asia, namely Korea (the largest), Indonesia, the Philippines, China and Taiwan. She is the only survivor who struggles to resist the use of the term "comfort women". Comfort means something soft, safe and friendly. "We are victims of wartime rape and sexual assault by the Imperial Japanese Army." O'Herne demanded an apology from the Japanese Government personally and was among the survivors who refused monetary compensation from the Asian Women's Fund. He also emphasized how rape is a tool for subjugation in war so it should be seen as a war crime and a crime against humanity. And another interesting thing is that this testimony to Jan Ruff-O'Herne was also made into a documentary film produced in Australia by director Ned Lander, entitled 50 Years of Silence (1994).

Keywords: Jan Ruff-O'Herne, rape, sex slave

ABSTRAK

Tak banyak orang membaca berita mengenai kepulangan Jan Ruff-O'Herne pada pagi tanggal 19 Agustus 2019 di rumahnya, di Adelaide, Australia, dikelilingi oleh anak, cucu dan cucu buyutnya. Usianya 96 tahun. Jan Ruff-O'Herne meninggalkan jejak perjuangan selama lebih lima dekade untuk berkampanye melawan pemerkosaan dalam perang dan menghabiskan sisa hidupnya untuk merebut kembali martabatnya. Dia adalah perempuan Eropa pertama yang berani bersaksi di depan publik secara terbuka. Dia merobek kebisuan sejarah hitam yang ditolak untuk waktu yang sangat lama oleh pihak yang melakukannya. Untuk itu, dia menerima berbagai penghargaan, di antaranya dari Pemerintah Australia, Pemerintah Belanda, dan Vatikan. O'Herne adalah salah satu dari sedikit perempuan Eropa di wilayah pendudukan Jepang selama Perang Dunia II yang dipaksa menjadi budak seks. Sebagian besar berasal dari Asia, yakni Korea (terbesar), Indonesia, Filipina, China dan Taiwan. Dia menjadi satu-satunya survivor yang berjuang untuk menolak penggunaan istilah "comfort women". Comfort mengandung arti sesuatu yang lembut aman dan ramah. "Kami ini korban perkosaan dan serangan seksual dalam masa perang oleh tentara Kerajaan Jepang". O'Herne menuntut permintaan maaf Pemerintah Jepang secara pribadi dan berada dalam barisan survivor yang menolak kompensasi berupa uang dari Asian Women Fund. Dia juga menekankan bagaimana perkosaan menjadi alat

untuk menundukkan dalam perang sehingga harus dilihat sebagai kejahatan kriminal perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang menarik lainnya adalah testimoni atas Jan Ruff-O’Herne ini juga dibentuk menjadi sebuah film dokumenter yang diproduksi di Australia dengan sutradara Ned Lander, berjudul *50 Years of Silence* (1994).

Kata Kunci: Jan Ruff-O’Herne, pemerkosaan, budak seks

PENDAHULUAN

Saya menemuinya di Tokyo pada tahun 2000 dan di Den Haag pada tahun 2001.¹

Den Haag, awal Desember 2001

Dari atas panggung Lucent Danstheatre, Den Haag, Belanda, Jan Ruff- O’Herne (78 tahun) mengangkat tinggi-tinggi kopi dari 240 halaman *Final Judgment* yang diberikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Gabrielle Kirk McDonald, siang, waktu setempat, tanggal 4 Desember 2001. Mulutnya komat-kamit. Air matanya tergenang.

Keputusan itu diambil setelah Majelis Hakim mendengarkan kesaksian 35 dari 75 penyintas yang hadir selama proses pengadilan di Tokyo (Tokyo Tribunal) tahun 2000. Pengadilan Rakyat itu merupakan jawaban atas kegagalan Jepang memenuhi tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan bagi sekitar 200.000 perempuan di Asia yang dipaksa menjadi budak seks di ‘*comfort stations*’ bagi para serdadu Jepang selama Perang Dunia II.

Final Judgment itu merupakan simbol diakhirinya pengampunan atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, yang oleh ketiadaan mekanisme memungkinkan pelakunya kebal hukum. Singkatnya, Majelis Hakim menyatakan bersalah kepada Kaisar Hirohito, Kaisar Showa yang antara tahun 1937-1945 adalah Kepala Negara Jepang dan Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan Jepang; Rikichi Ando, Komando Angkatan Perang untuk wilayah Cina Selatan mulai Oktober 1940, dan lain-lain.

¹ Semua bahan diambil dari laporan Maria Hartaningsih antara tahun 2000 dan 2001 di Harian Pagi *Kompas*.

“Lega rasanya,” ucapnya pelan, “Tetapi, lebih dari itu, saya merasakan solidaritas yang sangat tinggi dari semua *survivor*.” Kemudian dia memeluk Ema Kastimah (75 tahun), *survivor* dari Cimahi, Jawa Barat. Dua perempuan ini untuk beberapa saat tenggelam dalam perasaan yang hanya diketahui oleh keduanya.

Situasi siang di Den Haag pada awal musim dingin itu sangat berbeda dengan situasi di Tokyo setahun sebelumnya.

Tokyo, 26 Desember 2000

Ketika mendengar musik latar yang mirip lagu-lagu mars ciptaan komponis Jerman Richard Wagner mengiringi gladi resik di panggung Kudan Kaikan, Tokyo, Jepang, Kamis (7/12) petang, Jan Ruff-O’Herne (77 tahun) segera meninggalkan tempat duduknya. Wajah Jan tampak pucat dan kedua tangannya menutup telinganya. “Bisa tolong diganti musiknya,” suaranya bergetar saat menemui seorang anggota panitia penyelenggara. Ketika suara musik berangsur melemah, Jan berangsur tampak lebih tenang.

Selama puluhan tahun dalam hidupnya, Jan, yang dipaksa menjadi budak nafsu serdadu Jepang di Semarang selama tiga bulan, mulai bulan Februari tahun 1944, mengalami *post-traumatic stress disorder (PTSD)*. Selama puluhan tahun ia tidak bisa mendengar atau melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang.

Jan adalah anak ketiga dari empat bersaudara anak keluarga O’Herne-campuran Perancis-Belanda, yang dilahirkan di Cepiring, Jawa Tengah, tahun 1923. Kebahagiaannya itu direnggut oleh pendudukan Jepang di Jawa pada tahun 1942. Keluarga O’Herne ditempatkan di kamp konsentrasi Ambarawa sampai bulan Februari

1944, ketika Jan bersama sembilan gadis peranakan Eropa lainnya dipaksa ikut tentara Jepang ke Semarang.

Tidak ada satu pun yang kemudian mampu mengembalikan apa yang telah dihancurkan oleh perbuatan biadab para serdadu Jepang di dalam kamar-kamar gedung “*The House of the Seven Seas*”, sebuah klub pelesiran untuk para perwira Jepang di Semarang.

“Saya dibebaskan dari rumah neraka itu, tetapi lukanya tak pernah sembuh. Bayangan di rumah bordil itu tidak pernah pergi dari ingatan saya...” Jan Ruff menceritakan seluruh kebenaran mengenai dirinya kepada Tom O’Herne sebelum mereka menikah. “Waktu itu Tom menangis tanpa suara, tetapi cintanya pada saya tidak pernah berubah. Kami kemudian berjanji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa pun.”

Dalam kehidupan perkawinannya yang bahagia dengan Tom Ruff, warga Inggris yang kemudian bermigrasi ke Australia dan menetap di Adelaide, Tasmania, Jan selalu mengingatkan kepada sanak keluarga dan seluruh kerabatnya, agar tidak pernah memberinya bunga pada hari-hari bahagia mereka. Ibu dua anak dan nenek dua cucu itu tak mampu menjelaskan bahwa bunga selalu mengingatkannya pada vas bunga berisi jenis bunga tertentu yang selalu ditaruh di ruang tidurnya di “*The House of the Seven Seas*”.

Dia juga tak pernah mau mengunjungi dokter kalau tidak amat sangat terpaksa. Sosok dokter di dalam sebuah ruang praktik selalu mengingatkannya pada dokter di “*The House of the Seven Seas*” yang dia pikir bisa menolongnya, tetapi malah dengan brutal memperkosanya.

Setelah 50 tahun melewati malam-malam dengan mimpi yang mengerikan, pada awal tahun 1992, secara kebetulan, Jan melihat kesaksian di televisi dari beberapa perempuan Korea yang dijuluki sebagai “*comfort women*” pada masa pendudukan Jepang. “Tiba-tiba saya tahu apa yang harus saya lakukan...”

Keberanian para perempuan Korea itu memberikan kekuatan kepada Jan untuk berani melakukan satu tindakan radikal yang dia

katakan sebagai proses penyembuhan. “Saya harus bersaksi mengungkapkan kebenaran. Saya harus membuka seluruh rahasia hidup saya. Apa yang terjadi pada saya bukanlah aib saya, tetapi aib Pemerintah Jepang.”

Bukunya *50 Years of Silence: Comfort Women of Indonesia* (1994) ditulis dengan dukungan seluruh keluarga, melengkapi seluruh referensi mengenai masalah perkosaan dalam perang. Sementara versi film dokumenternya berdurasi 57 menit, versi bukunya 300-an halaman. Apakah film dokumenternya mampu merangkum trauma psikologis yang diderita Jan Ruff? Tentu saja sulit sekali. Sebab, ketika sastra telah berbicara, film menjadi bungkam. Demikian sebaliknya, ketika film sudah berbicara, sastra menjadi tenggelam. Satu hal, film dokumenternya dengan narasi bahasa Inggris berusaha setia dengan substansi tekstual dari bukunya.

PEMBAHASAN

Isu ‘perempuan penghibur’ berkembang menjadi isu sentral dalam perdebatan sejarah tentang perang, terkait nasionalisme, patriotisme, agama, dan pengalaman dalam hal gender, seksualitas, ras dan bangsa.

Pada tahun 1966, Kementerian Pendidikan Jepang memasukkan isu ‘perempuan penghibur’ sebagai bagian dari pelajaran sejarah untuk siswa sekolah menengah pertama. Sejak April 1997, masalah wanita penghibur telah diajarkan di SMP sebagai fakta sejarah. Namun, ada dua kelompok yang memiliki perspektif berbeda dan memperebutkan deskripsi atau definisi mengenai ‘perempuan penghibur’ dalam buku teks sekolah menengah di Jepang.

Kelompok yang disebut oleh Rebecca Clifford (2004) sebagai neonasionalis-revisionis, menegaskan bahwa ‘perempuan penghibur’ Asia yang memasok seks kepada serdadu Jepang bukanlah ‘budak seks militer’ yang dipaksa oleh tentara kekaisaran, melainkan pelacur biasa yang melakukannya secara sukarela. Kelompok ini meminta pemerintah Jepang menarik kembali permintaan maaf kepada negara-negara di Asia

yang diduduki selama perang, khususnya Korea dan China, dan menghapus lembar hitam itu dari buku pelajaran sejarah sekolah menengah.

Termasuk di dalam kelompok yang menentang cap ‘penjahat perang’ pada Jepang adalah pakar pendidikan Fujioka Nobukatsu dan kartunis Kobayashi Yoshinori. Mereka khawatir anak-anak mempelajari sejarah yang negatif sehingga tidak dapat menghargai budaya Jepang. Feminis dan profesor antropologi kultural, Tomomi Yamaguchi (2017), menganalisis fenomena “*The Japan is Great*” dengan sangat menarik.²

Kelompok lain, sering disebut sebagai *pacifis-revisionis*, menekankan hak asasi manusia. Dalam pengadilan tahun 2000 itu, sejarawan Jepang, Akira Yamada dan Yoshiaki Yoshimi, meyakinkan Majelis Hakim bahwa sistem *comfort stations* dirancang secara rapi dan sistematis oleh para komando militer Jepang yang mempunyai akses pribadi kepada kaisar. Cara ini merupakan tanggapan atas terjadinya pemerkosaan massal di Nanking, Tiongkok, tahun 1937.

Sejarawan Yoshiaki Yoshimi (1995) menulis, ada anggapan umum bahwa perempuan penghibur merupakan alat untuk pembebasan seksual prajurit militer. Hak asasinya sebagai manusia dikoyak. Banyak prajurit Jepang menggenggam mitos bahwa laki-laki ‘sejati’ adalah laki-laki yang ‘mengenal’ perempuan. Oleh karena itu, setelah ketegangan selama berperang, para prajurit didorong pergi ke ‘*comfort stations*’.

Yoshimi menghubungkan cara berpikir yang maskulinis-patriarkis itu mendukung prostitusi berlisensi di Jepang dan koloni-koloni mereka dan sistem ‘*comfort Stations*’ di medan perang (223-24). Istilah ‘*comfort women*’ digunakan untuk melegitimasi perbuatan kriminal dalam perang. Pada tahun 1994-1997, beberapa pejabat tinggi Jepang menyatakan, *comfort women* adalah relawan. Ini menyangkali adanya

penipuan, pengancaman, pemaksaan, dan penculikan terhadap korban.

Kegagalan negara mempertanggungjawabkan perbuatan kriminal itu sudah terjadi dalam Pengadilan Internasional Kriminal Perang untuk Timur Jauh di Tokyo, April 1946-November 1948. Pengadilan itu sama sekali tidak menyinggung kasus perbudakan seks oleh militer Jepang. Pemerintah Jepang melakukan pelanggaran tanggung jawab negara dengan menghancurkan berbagai dokumen, termasuk beberapa dokumen yang berkaitan dengan sistem perbudakan seksual dalam perang.

Isu ‘perempuan penghibur’ menawarkan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali konstruksi ideologis historis dan kontemporer tentang gender dan seksualitas dan membawa perdebatan melampaui diskursus dominan yang sangat *male-centric*.

Terkait dengan subjektivitas seksual dan gender, maka buku otobiografi dan memoir yang ditulis oleh korban—yakni perempuan yang dipaksa menjadi budak seks serdadu Jepang dalam perang—merupakan representasi dalam narasi pribadi. Subjektivitas ini, betapa pun juga dibentuk melalui perbedaan ras dan kebangsaan.

Keberanian Jan Ruff-O’Herne untuk menulis dan mengungkapkan seluruh pengalamannya itu merupakan tindakan yang luar biasa. Selama 50 tahun dia berada di dalam ‘gua perlindungan’ di dalam dirinya. Dalam isu ini dia adalah ‘minoritas’ berganda: perempuan Eropa, Katolik, dan bermukim di negara maju dengan kehidupan berkeluarga yang relatif tentram dan aman. Sementara sebagian korban dari Asia, Indonesia khususnya, sebagian besar berada pada kondisi ekonomi subsisten, menyandang stigma dan untuk waktu yang lama diabaikan keberadaannya oleh negara.

Dalam otobiografinya, Ruff-O’Herne menulis bahwa ketika semua korban pemerkosaan perang Tentara Kekaisaran Jepang dikumpulkan oleh tentara Jepang di tempat terpisah di kamp penjara wanita Keramat, perempuan Belanda dari kamp bagian lain menghina mereka,

2 Lebih jauh baca Tomomi Yamaguchi, “The “Japan Is Great!” Boom, Historical Revisionism, and the Government”, *The Asia-Pacific Journal*, March 15, 2017 Volume 15, Issue 6, Number 3, Article ID 5021, <https://apjif.org/2017/06/Yamaguchi.html>

dengan menyebut mereka sebagai ‘pelacur’ dan ‘pengkhianat’ (Ruff-O’Herne 115).

Mereka menyalahkan korban dan menarik garis tegas di antara sesama korban, dengan memandang O’Herne sebagai ‘liyan’. Reaksi itu, selain menunjukkan bekerjanya wacana patriarkis yang dominan, juga terjadi ‘dehumanisasi sistematis’ (Bell Hooks, 1984) dalam komunitas korban.

Penghinaan itu berimbas kepada adik perempuannya. Dukungan dari seorang biarawati Katolik yang memiliki hubungan dengan Ruff-O’Herne tidak mampu melepaskannya dari kubangan rasa malu di dalam ruang dirinya, yang membuat dia terbisukan.

Banyak *angle* bisa dipilih untuk membedah otobiografi Jan Ruff-O’Herne. Saya mencoba menelaah proses di dalam dirinya untuk tiba pada keputusan membuka rahasia terbesar dirinya secara terbuka di ranah publik.

Ruff-O’Herne tidak berbicara secara terbuka tentang pengalamannya sampai tahun 1992, sebelum melihat di televisi tiga perempuan Korea korban perbudakan seksual serdadu Jepang pada masa perang menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari pemerintah Jepang.

Acara di televisi itu memicu proses penyadaran dalam diri Ruff-O’Herne, membuat dia paham bahwa seluruh pengalaman personalnya mempunyai akar struktural. Namun, dia juga paham, untuk menghasilkan perubahan yang signifikan, diperlukan kerja kolektif.

Proses itu membuat pergulatan selama puluhan tahun di dalam ruang diri Ruff-O’Herne yang tersembunyi, seperti menemukan titik terangnya. Ruang tersembunyi ini oleh Vaclav Havel disebut sebagai *hidden sphere*, suatu ruang di dalam diri di mana kenyataan yang baru diuji kembali dan ditanggapi; suatu ruang di mana kehidupan dihidupi secara terbuka dalam kebenaran (Havel, 1986; Bouvard, 1994).

Hidden’s sphere merupakan suatu kekuatan politik yang dahsyat. Ruang tersembunyi ini dari perspektif kekuasaan merupakan wilayah paling berbahaya, karena dia seperti gejala yang bisa

tiba-tiba menampakkan wujudnya ke dalam sistem. Kalau *hidden’s sphere* ini terbuka, maka biasanya sudah terlambat untuk menutupnya kembali. Dari ruang tersembunyi itu lah manusia bisa menciptakan situasi yang menyebabkan paniknya rezim yang berkuasa, betapa pun sederhananya tindakan itu.

Ruff-O’Herne kemudian melihat dunia dengan caranya sendiri dan bisa mengambil keputusan. Dengan keputusan itu, Ruff-O’Herne menjadi bagian dari gerakan yang menuntut permintaan maaf pemerintah Jepang atas kebrutalannya selama perang.

Dalam Audiensi Publik Internasional tentang Kejahatan Perang Jepang di Tokyo pada bulan Desember 1992, Ruff-O’Herne memecah kebisuan dengan membagikan kisahnya. Pada tahun 1994, dengan dukungan seluruh keluarga, dia menerbitkan memoar pribadi, *Fifty Years of Silence: Comfort Women of Indonesia*, yang mendokumentasikan pergulatannya menjalani kehidupan sebagai penyintas perkosaan dan perbudakan seksual dalam perang. Keputusan itu tidak mudah.

Betapa pun, wacana penyintas atau *survivor* bersifat kontradiktif, apalagi kebiadaban tentara Kekaisaran itu masih terus menjadi kontroversi atas nama ‘nasionalisme’, ‘martabat bangsa’ dan lain-lain, sambil terus menganggap korban tidak bermartabat, bahkan tidak ada. Maka, rasa sakit akibat penghinaan lebih dominan, membuat ingatan akan serangan pada tubuh itu sulit dihapus (Mardorossian, 2002).

Ruff-O’Herne menunjukkan proses perjuangannya melalui ruang ‘*a-politis*’ untuk berbicara: ruang personal. Namun demikian, mengutip Carol Hanisch (1969), yang *a-politis* itu sesungguhnya sangat politis apalagi ketika digemakan di ruang publik.³

Suatu gerakan dimulai dari proses di dalam diri tiap-tiap individu. Melalui *consciousness raising*

3 Carol Hanisch, “The Personal is Political”, dalam Shulamith Firestone and Anne Koedt, Ed, (1970), *Notes from the Second Year: Women Liberation*. NY; Radical Feminism

atau membangkitkan kesadaran (selanjutnya disebut CR), perempuan memahami posisi dan situasinya dalam suatu struktur sosial, sekaligus melakukan identifikasi subjektif atas dirinya sebagai anggota suatu kelompok. CR diyakini oleh para feminis sebagai suatu proses yang berhasil menghadirkan perempuan dengan cara baru untuk mendefinisikan dan menamakan ulang dunia.⁴

Dalam proses penyadaran, hubungan-hubungan kekuasaan dan pengalaman korban tidak ditelaah hanya secara sosiologis karena di situ ada klaim kebenaran dari pemilik kekuasaan. Klaim kebenaran ini selalu digunakan untuk merebut posisi tawar politik karena kekuasaan yang menindas diawali dengan mempersepsikan realitas perempuan dan kemudian terus mereproduksinya.

Proses penyadaran penting supaya sampai pada yang epistemologis. Saat kesadaran terbentuk—yaitu perempuan tiba pada posisi “mengetahui” realitasnya—dia tidak berada pada status kognitif dan psikologis, tetapi dapat menunjuk kepada tindakan sosial yang bermakna dan bisa merebut klaim kebenaran dari pihak yang berkuasa. Kegiatan epistemik untuk menyingkapkan kenyataan bahwa ada pengalaman, pengetahuan, dan subjektivitas yang selama ini diabaikan ini sangat penting karena klaim kebenaran akan selalu digunakan untuk merebut posisi tawar politik kekuasaan.

Oleh karena itu, seperti diingatkan Hirsch (1995), ingatan yang berhubungan dengan pengalaman individual merupakan locus politik karena akan selalu dikompetisikan oleh berbagai kelompok untuk memperoleh posisi tawar politik terkuat. Ini juga sangat berkaitan bagaimana sejarah dikonstruksikan dan diinterpretasikan.

Isi sebuah klaim ‘saya tahu’ lebih dari sekadar

4 Lebih jauh dapat dibaca dalam Catharine A. MacKinnon. (1991), *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge & London: Harvard University Press. Hal. 83-105

menegaskan sebuah preposisi.⁵ Di sini pandangan Austin menjadi penting. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia mengetahui maka ia bukan semata-mata menyampaikan sebuah status kognitif atau psikologis, melainkan menunjukkan sebuah tindakan sosial yang bermakna. Kesaksian atau testimoni di depan publik, bisa dilihat sebagai upaya kelompok masyarakat korban merebut klaim kebenaran.

Proses tersebut tidak seragam karena setiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda. Namun pengalaman itu menjadi dasar bagi diri perempuan untuk membangun pengetahuan tentang realitas sosialnya, agar ia dapat mendefinisikan sendiri situasinya. Itulah inti dari seluruh proses CR pada perempuan, karena realitas sosial perempuan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibangun kembali.

Di sini ada beberapa sebab. Pertama, realitas sosial perempuan dan situasinya sudah didefinisikan oleh kekuasaan yang menindas dengan diciptakannya ideologi tentang ‘perempuan baik-baik’. Kedua, kalau kita tidak memahami ideologi dominan dari otonomi moral dalam kebudayaan kita, juga definisi moral dari mereka yang memiliki hak istimewa, maka suara perempuan akan terus terbisukan.

5 J.L. Austin dalam “*Other Minds*” mengatakan, “... saying ‘I know’ is not saying ‘I have performed an especially striking feat of cognition, superior, in the same scale as believing and being sure, to being quite sure. Just as promising is not something superior, in the same scale as hoping and intending, even to merely fully intending; for there is nothing in that scale superior is fully intending. When I say, ‘I know’, I give others my word: I give others my authority for saying that ‘S is P’. If you say you know something, the most immediate challenge takes the form of asking, ‘Are you in a position to know?’: that is, you must undertake to show not merely that you are sure of it, but that it is within your cognizance.” Dalam J.O Urmson dan G.J. Warnoch (ed), 1970, hlm.99 dan hlm.100. “Saya tahu” dalam hal ini juga bisa mengacu pada apa yang disebut Giddens sebagai *discursive consciousness*, yang mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*, 2002, hlm.28-29, atau yang disebut Paulo Freire dalam *Paedagogy of the Opressed* (1978) sebagai kesadaran kritis.

Situasi ketidakberdayaan ini seperti didukung oleh pandangan yang kuat mengenai perempuan sebagai bagian dari *generalized other*,⁶ meminjam istilah yang digunakan Seyla Benhabib (1995, 1997), yang secara bebas diartikan sebagai komunitas sosial yang membangun definisi bagi jati diri anggota komunitasnya.

Orang tidak bisa menginterpretasikan perannya secara bebas, tetapi mengambil peran 'seharusnya' dan dibatinkan secara individual. Dengan demikian, identitas pribadi lebur di dalamnya, dan itu membuat Ruff-O'Herne terus memendam kesakitannya selama 50 tahun.

Konsep *generalized other* ini berpunggung dengan apa yang disebut *the concrete other*, kembali meminjam istilah Benhabib (1997), yang di dalamnya terkandung makna bahwa setiap makhluk rasional mempunyai sejarah riilnya, memiliki identitas nyata dan situasi emosional afektif yang unik. Dalam *concrete other* ada suara hati. Hubungan dengan orang lain diatur atas dasar norma kesetaraan dan kesalingan yang komplementer.

Sementara baik kisah dalam buku dan film dokumenternya memiliki kesamaan benang

6 Istilah ini dipinjam dari George Herbert Mead. Seyla Benhabib menggunakan istilah itu untuk mengkritik pemecahan moral yang mengacu pada pemikiran yang formal dan abstrak dalam perdebatan antara Gilligan dan Kohlberg. Berdasarkan penelitiannya, Gilligan (1982) mengaitkan jalur keadilan dengan perkembangan penalaran moral laki-laki dan jalur kepedulian dengan perkembangan penalaran moral perempuan sehingga melahirkan tafsir esensialisme. Landasannya adalah perspektif yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan problem moral. Dalam reaksinya terhadap pandangan Gilligan, Kohlberg (1984) menyatakan bahwa keadilan dan hak di satu pihak, serta peduli dan tanggungjawab di pihak lain bukanlah dua jalur perkembangan moral yang berbeda, melainkan dua orientasi berbeda yang tidak ditentukan oleh seks. Lebih jauh baca, Seyla Benhabib, "The Generalized and the Concrete Others: The Kohlberg-Gilligan Controversy and Moral Theory" dalam Diana Tietjens Meyers (ed), *Feminist Social Thought: A Reader*, 1997, hlm. 736-751 dan 754, 22n dan Karlina Supelli, "Konsepsi Perempuan tentang Moralitas", disampaikan dalam Kuliah Umum dalam rangka HUT ke-10 Program Kajian Wanita, Universitas Indonesia, tanggal 10 November, 2000.

merah, yaitu perjuangan Jan Ruff O'Herne mengungkap kekejian perang tatkala dalam persinggahannya di pulau Jawa di sekitar tahun 45, ia dan banyak wanita lain dijadikan budak pemuas nafsu seks tentara Jepang yang sedang menjajah Indonesia.

Film dokumenternya yang bergaya kuno itu sekilas nampak berjenis film biografi sejarah. Namun yang lebih menekankan kegigihannya menuntut keadilan sampai ke Tokyo dan mengajak wanita-wanita Belanda yang senasib dengan dirinya, dengan bersaksi di forum-forum peradilan internasional, daripada rekaman penderitaannya sebagai budak seks.

Padahal film dokumenter punya kemampuan membuat adegan-adegan rekonstruktif, terutama aksi kekerasan seksual yang brutal atas wanita-wanita dalam masa perang. Pendeknya, film dokumenternya lebih menekankan tuntutan keadilan yang menjadi heboh melalui pemberitaan pers. Maka, baik buku maupun film dokumenternya tidak menjeritkan dendam kesumat, melainkan penegakan hak asasi manusia.

PENUTUP

Demikianlah otobiografi Jan Ruff-O'Herne telah "menggangu" wacana dominan dan melemahkan taktik politik serta 'mengusik' konstruksi patriarkal mengenai subjektivitas. Namun bagi dia, yang terpenting adalah, bahwa seluruh proses di Tokyo dan Den Haag merupakan proses pemulihan yang berkelanjutan. Jan Ruff-O'Herne mengakhiri bukunya dengan mengungkapkan bahwa meskipun untuk waktu yang lama dia takut akan konsekuensi dari tindakannya, dia telah sampai pada perasaan damai, dan cinta serta penerimaan (Ruff-O'Herne 152).

Akhirnya, saya ingin menunjukkan bahwa feminisme dan advokasi hak asasi manusia telah mencapai tahap di mana orang dapat menantang kekerasan seksual, baik dalam perang mau pun dalam situasi apa pun. Seperti dikatakan Jan Ruff-O'Herne, "Situasi serupa masih terus terjadi dalam perang di mana pun. Dalam hal ini

dunia tidak pernah berubah dan kita harus terus menggapai-gapai mencari keadilan.”

Namun, serangan dan serangan seksual tak hanya terjadi saat perang. Kalau kita mau mengubah dunia agar mekanisme keadilan terhadap korban lebih jelas dan lebih mudah digapai, kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, harus dihentikan. Kalau masih terus diabaikan, maka cita-cita demokrasi, kemanusiaan, hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan dan lain-lain yang diciptakan oleh teori-teori besar untuk kemaslahatan hidup manusia, hanya berhenti sebatas jargon: terus disemburkan sampai berbusa-busa, namun tak lebih dari pepesan kosong!

Dan bagaimanapun, dengan segala kekurangan film dokumenter atas substansi bukunya, film dokumenternya ikut meneguhkan kebenaran-kebenaran historis atas individu yang mengalami horor fisik dan mental di masa Perang Dunia II. Film dokumenternya beroleh penghargaan internasional, sedangkan bukunya diapresiasi secara meluas karena diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Benhabib, Seyla. *The Generalized and the Concrete Others: The Kohlberg-Gilligan Controversy and Moral Theory dalam Diana Tietjens Meyers (ed), Feminist Social Thought: A Reader*, New York dan London: Routledge, 1997.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Opressed*. New York: The Continuum International Publishing Group Inc, 1970.

Hanisch, Carol. *The Personal is Political*, dalam Shulamith Firestone and Anne Koedt, Ed, *Notes from the Second Year: Women Liberation*. NY; Radical Feminism, 1970.

Hirsch, Herbert. *Genocide and the Politics of Memory: Studying Death to Preserve Life*, North Carolina: University of North Carolina Press, 1995.

J.O.Urmson&G.J Warnock (Ed), *Philopsophical Papers*, Second Edition, Oxford: Clarindon paperbacks, 1970.

MacKinnon, Catharine A. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge & London: Havard University Press, 1991.

O’Herne, Jan Ruff. *50 Years of Silence: Comfort Woman of Indonesia*. Singapore: Toppan Company (S) PTE LTD, 1994.

Priyono, B-Herry. *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG, 2002.

Yoshiaki, Yoshimi. *Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II*. NY Columbia University Press, 1995.

Jurnal

Clifford, Rebecca. *Cleansing History, Cleansing Japan: Kobayashi Yoshinori’s Analects of War and Japan’s Revisionist Revival*, Nissan Occasional Paper Series, diunggah dari https://www.nissan.ox.ac.uk/sites/default/files/nissan/documents/media/nops35_0.pdf, 2004.

Mardorossian, Carine M (2002), “Toward a New Feminist Theory of Rape.” *Signs*, vol. 27, no. 3, 2002, pp. 743–775

Tomomi Yamaguchi (2017), The “Japan Is Great!” Boom, Historical Revisionism, and the Government, *The Asia-Pacific Journal*, March 15, 2017, Volume 15, Issue 6, Number 3, Article ID 5021, diunduh dari <https://apjjf.org/2017/06/Yamaguchi.html>

Sumber lainnya

Hartiningsih, Maria. “*Jan Ruff-O’Herne: Mengungkap Kebenaran untuk Kesembuhan*”, Kompas, 30 Desember 2000

Hartiningsih, Maria. “*Memecahkan Kebisuan 50 Tahun,*” Kompas, 13 Desember 2000

Hartiningsih, Maria. “*Utang yang Tak Terbayar dengan Uang*”, Kompas, 10 Desember 2001

